



## KONFERENSI

Konferensi membangun tata ekonomi-politik baru pasca krisis kapitalisme global

3

## SEKOLAH LAPANGAN

SPI melantik kader pertanian berkelanjutan angkatan pertama

8

## EKONOMI RAKYAT

Perjuangan petani sembalun membangun kemandirian

10

EDISI 61. MARET 2009

Harga Rp. 2000,-

# PEMBARUAN TANI

MIMBAR KOMUNIKASI PETANI

## KONFLIK AGRARIA

### *Sidang kriminalisasi anggota SPI Damak Maliho*

Sidang terhadap tiga anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) Basis Damak Maliho digelar di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (11/2). Ketiga orang petani ini merupakan bagian dari anggota basis yang sedang berjuang dalam merebut kembali lahan mereka yang telah diambil paksa oleh PTPN IV Kebun Adolina. Ketiga petani ini terdiri dari Pak Jumadi alias Pak Ribut (59), Pak Ngatimin alias Wak Min (51), dan Pak Sumadi (58) didakwa pasal 47 ayat 1 UU Perkebunan No 18 tahun 2004.

Menurut warga, lahan yang sejak tahun 1960-an dikelola para petani ini telah diambil secara paksa oleh PT Sari Tugas pada tahun 1972. Saat itu perusahaan mendapat dukungan dari Kapten Kasmir Ali, penguasa Koramil Butepra pada waktu itu. Melalui teror dan intimidasi, aparat koramil memaksa warga untuk meninggalkan lahan. Pada tahun 1974, PT. Sari Tugas beralih nama menjadi PNP IV Pabatu, kemudian beralih lagi menjadi PNP VI Pabatu, dan hingga sekarang beralih nama menjadi PTPN IV Kebun Adolina Bah Jambi.

Sidang yang berlangsung hampir dua jam ini berisikan agenda pemberian keterangan saksi dari PTPN IV Kebun Adolina. Saksi yang dihadirkan terdiri dari Mandor I, Komandan Security dan dua orang petugas keamanan kebun.

Berdasarkan keterangan dari pengacara yang terdiri dari Irwansyah, SH MH dan Ibrahim Nainggolan, SH yang tergabung dalam PAHAM Sumatera Utara mengatakan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi kabur.

“Keterangan yang diberikan dari keempat saksi tersebut tidak ada satu orang pun yang mengetahui secara pasti siapa pelaku yang meracuni 379 tanaman kelapa sawit seperti yang tertera dalam Berita Acara Perkara yang menjadi

*Bersambung ke hal.2*



## Mengelola Lahan Kolektif

Petani di berbagai daerah di Indonesia kerap menjerit lantaran pupuk urea langka dipasaran. Sesuai hukum pasarnya, ketika pupuk langka pasti dibarengi dengan harga yang melambung tinggi. Seperti musim kemarau yang datang setiap tahun, kelangkaan pupuk dan harga yang mahal terus menghantui petani musim tanam datang.

Namun sebagian kecil petani yang menggunakan pupuk organik tidak risau akan kelangkaan pupuk tersebut. Seperti Jaya, ketika Pembaruan Tani berkunjung pada akhir tahun 2008 lalu, tampak sedang asik menggoyangkan tampah anyaman bambunya yang berisi benih bayam merah.

Begitupun Ukat, seorang petani lainnya dengan kepala tertutup caping sedang asik memanen cesim. Tidak jauh dari Ukat, tampak seseorang memanggul tumpukan rumput yang membuat kepalanya tidak tampak dari salah satu sisi. Ia menuju kandang kambing yang berada di bagian belakang lahan tersebut. Itu Amung yang

kesehariannya mengurus ternak kambing.

Mereka secara bersama menerapkan pertanian organik di atas lahan seluas 2 hektar yang terletak di Desa Cibeureum Kecamatan Dermaga Bogor. Di atas lahan itu Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pertanian Organik Serikat Petani Indonesia (SPI) berdiri semenjak 19 April 2005.

Cesim, kangkung, bayam merah, katu, daun bawang, juga padi dan ada juga pohon pepaya mereka tanam dilahan tersebut. Dilahan itu juga terdapat kolam ikan, tiga kandang kambing, serta empat buah pondok kayu beratap rumbia.

Di salah satu pondok itu tampak belasan orang berkumpul. Mereka merupakan perwakilan dari SPI Wilayah yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan pertanian organik.

Menurut Putro, seorang staff SPI yang juga pemberi materi dalam pelatihan tersebut, tanaman yang dibudidayakan memang memiliki rotasi jangka pendek dengan

*Bersambung ke hal.2*

**Sambungan dari hal.1** Mengelola lahan...

penanaman yang bergilir.

“Tanaman berotasi jangka pendek dengan pola tanaman bergilir akan menghindari peledakan hama dan menjaga unsur hara dalam tanah yang dibutuhkan tanaman,” kata alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) itu.

Secara ekonomi, Pusdiklat SPI dikelolah secara koperasi oleh empat keluarga tani. Lahan seluas 2 hektar ini, lanjut Putro, dapat menghasilkan sekitar Rp8-12 juta per bulan penghasilan kotor. Sedangkan penghasilan bersihnya Rp4-5 juta per bulan.

“Untuk pemasaran dilakukan secara langsung, bahkan ada juga yang sudah berlangganan. Selain itu hasil sayur organik itu juga bisa didapat di Jogja Plaza di Bogor,” tuturnya.

Selain memiliki nilai lebih ekonomi, Putro menuturkan, pertanian organik mengembalikan hakikat sosial petani. Karena pertanian organik sangat mendorong para petani

untuk bekerja sama. Bertani secara kolektif dalam bertanam dan memproduksi pupuk organik. Dan kebersamaan itu harus dikembalikan menjadi kekuatan petani yang semakin pudar disela penerapan pertanian dengan input kimiawi.

Soal lingkungan, tentu penerapan pertanian organik memiliki kelebihan. Selain manfaat kesehatan untuk petani yang terhinari dari bahan kimia, juga manfaat untuk orang lainnya yang mengonsumsi hasil pertanian organik tersebut.

Seperti Putro katakan, dengan pengaturan rotasi tanaman pertanian organik akan mengkondisikan tanah memproduksi unsur hara dengan alami, tidak dari input kimiawi, untuk kebutuhan tanaman.

Sehingga tanah tidak hanya menjadi media tanam, dimana tanaman yang tumbuh di atasnya hanya mendapat makan dari input eksternal kimia. Dan fakta menunjukkan hampir seluruh



lahan pertanian akan kering kerontang retak pecah-pecah ketika menghadapi musim kemarau berkepanjangan.

Keberadaan Pusdiklat SPI di Bogor, dan juga beberapa Pusdiklat SPI lainnya di daerah, dengan tegas meneriakkan perlawanan terhadap sistem pertanian yang menindas,

merusak lingkungan, memiskinkan keanekaragaman hayati dan mengesampingkan kearifan lokal.

Demikian pertanian berkelanjutan sejatinya dijalankan. Bukan berkelanjutan ketergantungan terhadap input eksternal dan penguasa pasar.#

**Sambungan dari hal.1** Sidang kriminalisasi...

rujukan jaksa” kata Irwansyah saat sidang berakhir.

Sidang lanjutan dari kasus ini akan digelar pada Rabu, 18 Februari 2009 yang akan datang dengan agenda menghadirkan saksi ahli dari pihak Kejaksaan.

**Petani terintimidasi**

Sementara itu, di lahan perjuangan hampir setiap hari Pengawas Perkebunan (Papan) PTPN IV Kebun Adolina bersama aparat TNI dan HANSIP mendatangi petani Desa Damak Maliho, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Menurut Ketua SPI Sumatera Utara Wagimin, anggota SPI Basis Damak Maliho merasa terintimidasi oleh pengawasan pihak aparat bersama perkebunan yang dinilai telah berlebihan. Bahkan, ada masyarakat yang mengalami tindak kekerasan. “Mulai dari pengrusakan tanaman, gubuk, penganiayaan sampai kepada penahanan tiga orang anggota

SPI Basis Damak Maliho,” ujarnya.

Ibu Malemukur Br Tarigan, seorang anggota SPI Sumut Basis Damak Maliho, pada Sabtu (7/2) lalu, mengaku didatangi delapan orang anggota TNI, dua orang Pengawas Perkebunan dan seorang Hansip bernama Kusmani. Ibu Malemukur berisikeras menggarap lahan tersebut walau dilarang aparat dan pihak perkebunan. “Kalau tidak boleh menggarap lahan ini, saya makan apa?” tegas Malemukur kepada pengawas perkebunan, anggota TNI, dan Hansip yang mendatangnya.

Hal serupa juga dialami anggota SPI Sumut basis Damak maliho lainnya. Sebut saja Ibu Aisah, Karo, Sawir. Mereka ditakuti akan ditangkap polisi kalau terus menggarap lahan tersebut. “Kenapa aku tidak boleh nanam? Inikan ladang bapak nenek ku,” kata Ibu Karo kepada salah seorang anggota TNI

yang melarangnya bertanam pada Selasa (13/2) lalu.

Menurut Wagimin, Masyarakat Damak Maliho telah menggarap dan membuka lahan tersebut sejak tahun 1960. Hingga pada tahun 1972, muncul perusahaan perkebunan P.T. Sari Tugas yang merampas dan mengambil alih secara paksa.

Melalui teror dan intimidasi, lanjutnya, aparat Koramil memaksa warga untuk meninggalkan lahan. Pada tahun 1974, P.T. Sari Tugas beralih nama menjadi PNP IV Pabatu, kemudian beralih lagi menjadi PNP VI Pabatu, dan hingga sekarang beralih nama menjadi PTPN IV Kebun Adolina Bah Jambi.

Dengan rentetan kejadian tersebut, bahkan pengusiran paksa yang telah terjadi pada akhir Januari lalu, yang mengakibatkan 30 hektar lahan garapan petani rusak dan 7 petani ditangkap. Dewan pimpinan wilayah SPI Sumut

dengan tegas menyatakan, kejadian tersebut merupakan bukti ketidakadilan hukum atas kepemilikan lahan petani yang dirampas.

Sementara, perjuangan petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) Basis Damak Maliho atas hak-hak nya yang dirampas oleh perkebunan, merupakan perjuangan untuk memenuhi tuntutan dan desakan ekonomi keluarga petani.

Bahkan keterlibatan anggota TNI, juga menjadi bukti keberpihakan aparat TNI yang seharusnya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat malah berpihak kepada PTPN IV Kebun Adolina, dan menjadi meresahkan petani Damak Maliho.

“Bukankah Hak Guna Usaha (HGU) dari PTPN IV Kebun Adolina ini telah berakhir pada akhir bulan Desember 2008 lalu. Dan masyarakat Damak Maliho merupakan pewaris dan pemilik lahan tersebut,” tegas Wagimin.#



**Penanggung Jawab:** Henry Saragih **Pemimpin Umum:** Zaenal Arifin Fuad **Pemimpin Redaksi:** Cecep Risnandar; **Redaksi:** Achmad Ya'kub, Ali Fahmi, Agus Rully, Tejo Pramono, Muhammad Ikhwan, Wilda Tarigan, Syahrani; **Reporter:** Elisha Kartini Samon, Susan Lusiana (Jakarta), Andriana (Medan) **Sekretaris Redaksi:** Tita Riana Zen **Keuangan:** Sriwahyuni **Sirkulasi:** Supriyanto, Gunawan;

**Penerbit:** Serikat Petani Indonesia (SPI)

**Alamat Redaksi:** Jl. Mampang Prapatan XIV No.5 Jakarta Selatan 12790. **Telp:** +62 21 7991890 **Fax:** +62 21 7993426 **Email:** pembeduanti@sipi.or.id **website:** www.sipi.or.id

## EKONOMI POLITIK

# Konferensi membangun tata ekonomi-politik baru pasca krisis kapitalisme global

Gerakan Rakyat Melawan Neo-Kolonialisme dan Imperialisme (Gerak Lawan) menggelar konferensi nasional “Membangun tata ekonomi-politik baru pasca krisis kapitalisme global” di Jakarta (17/2). Konferensi yang rencananya berlangsung dua hari ini dihadiri oleh aktivis gerakan sosial dan akademisi dari berbagai wilayah di Indonesia. Beberapa pembicara yang hadir diantaranya adalah Henry Saragih, Hendri Saparini, Ahmad Taufan Damanik, Syamsul Hadi dan Revisond Baswir.

Menurut ketua panitia konferensi, Indra Sakti Lubis, konferensi ini digelar sebagai jawaban kegelisahan rakyat atas perkembangan kapitalisme global. Pemerintahan saat ini yang sangat bercorak neoliberal telah gagal memajukan rakyat Indonesia dengan berbagai paradigma pembangunannya.

Sudah sejak lama organisasi gerakan rakyat yang tergabung dalam Gerak Lawan melakukan perlawanan terhadap neoliberalisme. Beberapa diantaranya sudah menunjukkan hasil dengan dimengukannya sebagian dari gugatan atas Undang-undang Penanaman Modal oleh Mahkamah Konstitusi.

Gerak Lawan merupakan gabungan organisasi-organisasi gerakan rakyat progresif dari berbagai sektor. Beberapa diantaranya adalah Serikat Petani Indonesia, Serikat Buruh Indonesia, Serikat Nelayan Indonesia, Solidaritas Perempuan, Walhi, Koalisi Anti Utang, LSADI dan berbagai organisasi gerakan rakyat lainnya.

Kegiatan yang berlangsung 2 hari hari tersebut menghasilkan rekomendasi untuk membentuk paradigma baru ekonomi politik sebagai anti tesis dari rejim ekonomi neoliberal yang bercokol saat ini. Di halaman-halaman berikutnya Pembaruan Tani menyajikan hasil liputan atas konferensi tersebut.#



## EKONOMI POLITIK

## Koreksi total sistem ekonomi-politik pasca krisis kapitalisme global

Buah dari teori dan praktek kapitalisme global telah dipanen, dan hasilnya sungguh pahit. Saat ini dunia dihantam multikrisis, mulai dari krisis pangan, energi, iklim, hingga finansial. Yang sungguh fenomenal dari buah pahit tersebut adalah, krisis finansial global ternyata dimulai dari negara paling kapitalis sedunia, Amerika Serikat. Dalam kurun waktu kurang dari setahun, hampir tiga juta orang sontak menjadi pengangguran di seluruh dunia. Kekacauan pangan (food riot) terjadi di berbagai negara, kacanya suplai energi global, ditambah rumit dengan kondisi planet dan lingkungan yang makin kritis.

Namun kapitalisme sebagai ideologi yang menjadi akar masalah, tidak tewas begitu saja. Aktor-aktornya seperti institusi keuangan internasional macam Bank Dunia, IMF, WTO dan pemerintah serakah terus berusaha menghidupkan phoenix dari abu kematiannya. Dengan struktur ekonomi-politik saat ini, kaum miskin seluruh dunia justru dalam resiko menanggung biaya krisis (cost of crisis) yang berat. Pemulihan krisis di negara pusat kapitalisme, kini menjadi beban yang tidak terhindarkan bagi negara-negara dunia ketiga.

Pelajaran dari krisis kapitalisme internasional yang bisa kita petik adalah, pertama, krisis kapitalisme adalah takdir historis, untuk itu krisis kapitalisme global akan selalu berulang dan berkelanjutan; kedua, meski pasti terkena krisis, kapitalisme selalu menemukan jalan guna mengatasi krisis, melalui hegemoni dan dominasi.

Masih solidnya pusat kapitalisme, Amerika Serikat, dengan program stimulus Barack Obama sebesar 800 milyar USD, tak pelak adalah usaha membangkitkan aktor utamanya: korporasi transnasional. Stimulus yang sama—walaupun dalam bahasa beda—banyak digelontorkan di berbagai belahan dunia. Proyek ekonomi mainstream pun masih berkibar secara global, mulai dari free trade multilateral hingga perjanjian FTA, baik regional maupun bilateral. Tercatat Uni

Eropa, ASEAN, dan banyak negara lain di belahan Asia, Eropa dan Oceania akan segera menandatangani perjanjian. Bank Dunia, IMF dan WTO pun terus mengkampanyekan liberalisasi, privatisasi dan deregulasi sebagai solusi sapu jagat. Fakta yang sah pun diputarbalikkan.

Akar dari krisis ini haruslah dicabut, untuk ditumbuhkan alternatif baru yang benar-benar untuk kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Gerakan rakyat di seluruh dunia telah lama mengusung alternatif untuk sistem ekonomi-politik. Dalam konteks Indonesia, gagasan alternatif bagi sistem politik-ekonomi ini haruslah yang konsisten pada nilai-nilai demokrasi, kemanusiaan, nasionalisme, gotong-royong, dan keadilan sosial.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan ke depan seharusnya adalah rencana dari terwujudnya keadilan ekonomi bagi rakyat Indonesia. Dan jalan menuju keadilan ekonomi tersebut adalah aturan main tentang hubungan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi yang tercantum dalam konstitusi. Konsepsi ini sudah jauh hari diperkenalkan sebagai dasar berdirinya demokrasi ekonomi sebagaimana terangkum dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945: “dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.”

Keinginan untuk meraih kemandirian dan kedaulatan ekonomi seharusnya diartikan sebagai impian untuk melepaskan ekonomi Indonesia dari jeratan dan ketergantungan asing, baik oleh negara asing maupun korporasi transnasional. Sebagaimana kita tahu untuk menuju kemandirian ekonomi

tersebut, Indonesia harus mampu mewujudkan kedaulatan di bidang keuangan, pangan, maupun energi.

Gerakan rakyat lawan neokolonialisme-imperialisme (GERAK LAWAN) telah bekerja sejak tahun 2005 untuk mewujudkan hal tersebut di Indonesia. Konsolidasi dari berbagai elemen rakyat, yakni buruh, tani, nelayan, migran, perempuan, kaum muda, environmentalis, dan pejuang HAM sudah 4 tahun berkecimpung dalam wacana dan praktek alternatif untuk sistem ekonomi-politik demi kesejahteraan dan keadilan sosial. Dalam momentum krisis kapitalisme saat ini, wacana dan praktek tersebut wajib disuarakan luas. Kerja sama yang lebih luas juga diperlukan dalam konteks pemikiran ekonomi-politik alternatif, terutama yang sesuai dengan kondisi bangsa ini. Keseluruhannya adalah dalam rangka koreksi total sistem ekonomi-politik pasca krisis kapitalisme global, menuju dunia yang lebih berkeadilan.

**Ekonomi konstitusi**

Untuk bisa keluar dari krisis global saat ini, hendaknya semua kebijakan perekonomian harus dikembalikan lagi kepada konstitusi, yakni UUD 1945. Hal itu dikemukakan ekonom Econit Hendri Saporini.

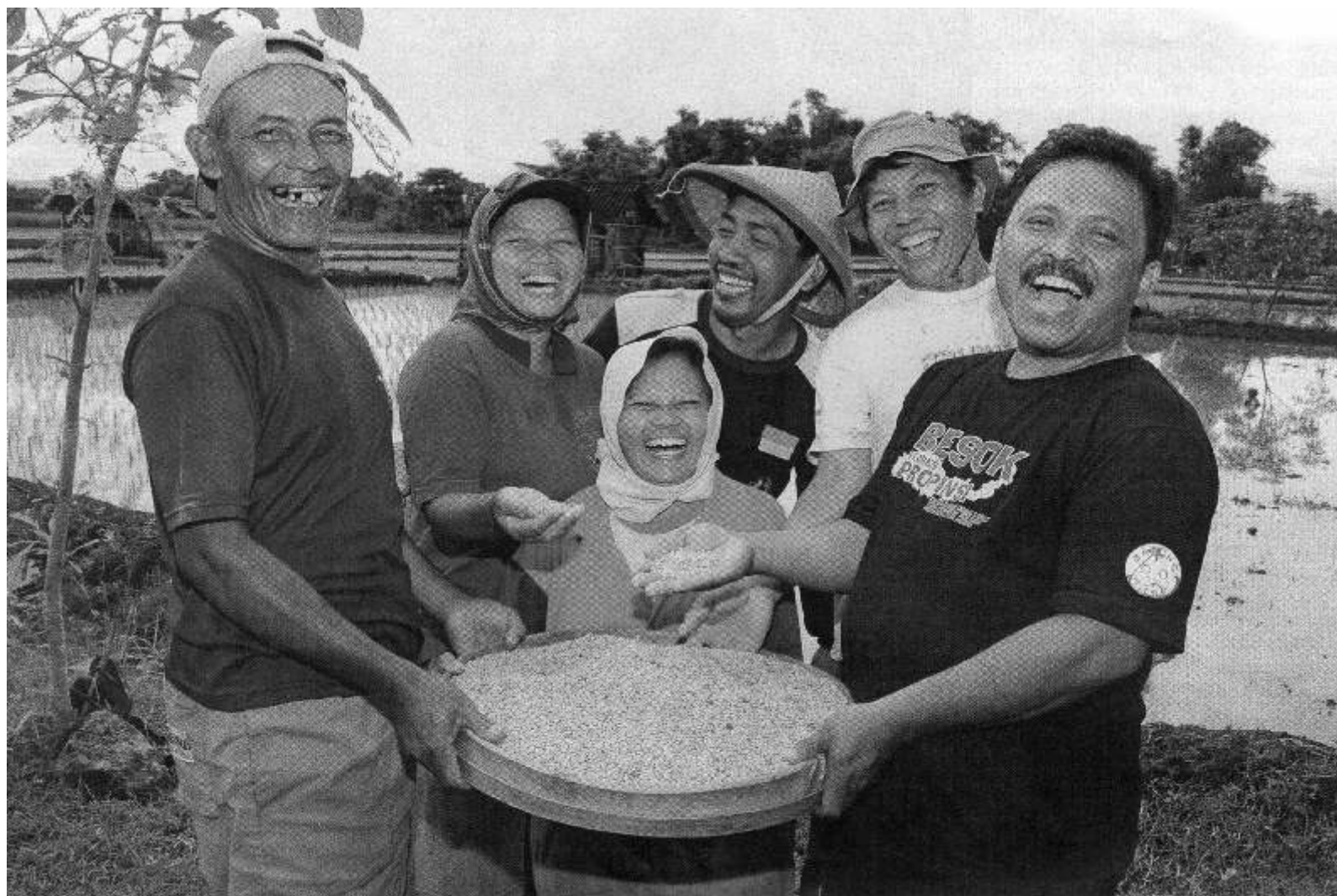
“Kembalikan pengelolaan ekonomi kepada konstitusi kita, karena kebijakan ekonomi saat ini sudah jauh menyimpang,” ungkapnya. Saat ini pemerintah masih saja menjalankan kebijakan neoliberalisme dengan melakukan privatisasi dan liberalisasi dalam mengelola perekonomian nasional. Menurut Hendri, sebenarnya Indonesia sudah kehilangan momentum ketika reformasi 1998 bergulir, dimana telah terjadi pengambil alihan aset-aset dari sektor swasta oleh pemerintah. Namun sayangnya aset-aset tersebut didistribusikan kembali bukan hanya ke swasta nasional tapi juga sudah dikuasai pihak luar seperti sekarang ?ini. Seharusnya negara tetap menguasai aset-aset

strategis tersebut melalui perusahaan-perusahaan BUMN.

Hendri juga mensinyalir kekuatan neoliberal asing sudah mengintervensi proses pembuatan undang-undang lewat para legislasi dan para pemikir Indonesia. Kekuatan asing bergerak lebih jauh lagi dari sekedar mengintervensi lewat bantuan-bantuan proyek dan bantuan utang dalam mempengaruhi kebijakan di Indonesia.

Lebih jauh lagi Hendri mengungkapkan masih banyak ketergantungan dan keterbelakangan ekonomi akibat kebijakan salah. Semakin jelas bahwa kedaulatan dan kemajuan ekonomi tidak mungkin diraih tanpa mengubah paradigma. Namun, langkah menuju kemandirian ekonomi mengharuskan pemerintah melakukan renegotiasi kontrak-kontrak penguasaan sumber daya alam. Tentu saja itu membutuhkan keberanian untuk membatalkan berbagai undang-undang yang sarat kepentingan korporasi asing. Belum lagi tantangan yang akan muncul dari para komprador yang menjadikan tatanan global sebagai referensi kebijakan ekonomi Indonesia.

Untuk mengatasi itu, harus ditempuh jalan baru dalam mengelola perekonomian. Hendri melihat perlu gerakan bersama untuk mendorong arah kebijakan ekonomi agar sesuai dengan amanat konstitusi dan menghentikan laju kekuatan neoliberalisme yang sudah mengurat akar. Penguasaan aset-aset strategis oleh negara lewat BUMN sangat penting bagi Indonesia. Karena ketika krisis kembali terjadi yang bisa diandalkan pemerintah untuk menyelamatkan ekonomi nasional hanyalah perusahaan-perusahaan BUMN tersebut. Langkah tersebut sesuai dengan amanat konstitusi mengenai pasal-pasal ekonomi yakni bumi dan air dan kekayaan harus dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.#



## EKONOMI POLITIK

# Kembali ke UUD 1945 adalah jalan alternatif sistem perekonomian dan politik

Kembali ke UUD 1945 adalah jalan alternatif sistem dalam mengelola perekonomian dan politik Indonesia yang saat ini dicengkeram rejim neoliberalisme. Demikian benang merah yang mengemuka dalam Konferensi Membangun Tata Ekonomi-politik Baru Pasca Krisis Kapitalisme Global yang diadakan Gerak Lawan di Jakarta (17/2).

Ekonom dari Universitas Gajah Mada, Revrison Baswir mengatakan saat ini kapitalisme neoliberal telah mendominasi Indonesia dan negara-negara dunia ketiga lainnya. Oleh karena itu, harus diadakan koreksi atas paradigma perekonomian Indonesia. "Kita harus kembali ke jalan yang benar," ujarnya.

Lebih lanjut, dia meningkatkan jalan alternatif bukan berarti baru, namun kembali ke cita-cita konstitusi merupakan alternatif yang paling

baik bagi bangsa Indonesia. Walaupun hal ini sudah seringkali dicoba namun pada prakteknya selalu digalkan oleh kekuatan kapitalisme. "Mereka selalu mensubversi gerakan yang mencoba untuk kembali ke konstitusi," katanya.

Hal senada dikemukakan Syamsul Hadi, staf pengajar Universitas Indonesia, bagi Indonesia sebetulnya tidak perlu dicari jauh-jauh. UUD 1945 telah memberikan arah yang jelas bagi model pembangunan seperti apa yang harus dijalankan oleh rakyat dan penyelenggara negara. Sistem ekonomi yang tergariskan dalam konstitusi kita memiliki unsur-unsur yang lengkap dari model negara kesejahteraan Eropa maupun model-model neo-sosialisme Amerika Latin. Pasal 27, 31, 33 dan 34 secara jelas mengatur tentang kewajiban negara di bidang pendidikan, kesejahteraan sosial

dan penyelidikan lapangan kerja.

Disamping itu, prinsip-prinsip seperti penguasaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat malahan telah diterapkan oleh Evo Morales di Bolivia dan Hugo Chavez di Venezuela. Kewajiban negara untuk menyediakan pekerjaan yang layak, pendidikan bagi rakyat, merawat fakir miskin dan anak terlantar adalah prinsip-prinsip yang kini dijadikan pedoman oleh kelompok neososialisme di Amerika Latin.

Tantangan saat ini, lanjut Syamsul adalah menerjemahkan prinsip-prinsip itu dengan penuh percaya diri dan nasionalisme. "Kita membutuhkan pemerintah yang dapat menerjemahkan konstitusi menjadi dalam model pembangunan yang konkrit, implementatif dan terukur," ujarnya.

Terakhir ia mengatakan

bahwa kombinasi antara prinsip kerakyatan, keadilan sosial dan kemakmuran adalah visi utama ekonomi konstitusi warisan para founding father.

Sementara itu, Ketua Umum SPI Henry Saragih mengatakan bahwa UUD 1945 merupakan jalan bagi bangsa Indonesia untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi yang telah direngut rejim kapitalisme neoliberal. Oleh karena itu perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkannya dengan membentuk sebuah gerakan ekonomi politik baru.

Henry juga mengatakan gerakan sosial melawan kapitalisme neoliberal perlu dukungan dari para pemikir dan akademisi dari berbagai wilayah. Oleh karena itu ia mendorong untuk dibentuk sebuah wadah bagi para pejuang ekonomi politik yang pro-rakyat.#

## KRISIS PANGAN

# Pertanian menyelamatkan bangsa dari krisis kapitalisme global

Pertanian menyelamatkan bangsa dari krisis kapitalisme global, sektor riil seperti pertanian, peternakan dan perikanan lah yang akan mampu bertahan di tengah krisis finansial yang ada saat ini seperti juga yang telah terbukti pada krisis tahun 1997-1998 lalu. Sektor riil yang dimaksud adalah hasil produksi yang orientasinya tidak hanya ekspor, namun lebih pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Hal ini disampaikan Achmad Ya'kub Ketua SPI pada Seminar Nasional BEM Fakultas Pertanian yang diadakan oleh Universitas Padjajaran di Bandung hari Sabtu, 21 Februari 2009.

Dalam seminar sehari itu sekitar 300 mahasiswa fakultas pertanian dari sejumlah universitas negeri dan swasta di Indonesia berkumpul untuk mencari langkah membangun pertanian sebagai sektor andalan menghadapi tantangan ekonomi global saat ini. Peserta seminar menyadari betul betapa kebijakan pertanian di Indonesia saat ini telah didikte oleh industri-industri pertanian raksasa demi keuntungan pihak-pihak tersebut dan bukannya disesuaikan dengan kebutuhan yang dirasakan oleh petani. Demikian juga intervensi dari IMF, Bank Dunia dan WTO yang dampaknya buruknya makin terasa bagi masyarakat sekarang ini.

Achmad Ya'kub menyatakan bahwa perubahan mendasar yang akan membantu bangsa ini untuk bertahan menghadapi krisis global perlu segera dilakukan, bukan hanya

demokrasi politik yang perlu dimajukan namun juga demokrasi ekonomi. Membangun sektor riil seperti pertanian dan mendorong kemandirian bangsa dengan melepaskan corak kapitalistik yang berkembang melalui privatisasi, deregulasi dan liberalisasi adalah suatu keharusan.

Seperti yang kita lihat sekarang ini negara-negara penganjur liberalisasi pasar sekarang ini justru pemerintahnya secara besar-besaran meng-intervensi pasar melalui berbagai kebijakan yang protektif. Mereka melanggar anjurannya sendiri.

Seminar ini nampaknya sejalan dengan Konferensi Membangun Tata Ekonomi-politik Baru Pasca Krisis Kapitalisme Global yang diadakan Gerak Lawan di Jakarta beberapa hari sebelumnya. Banyaknya pihak yang menyatakan keresahan terhadap sistem pembangunan yang dilakukan pemerintah hingga saat ini nampaknya tetap sulit untuk diterima pemerintah. Bahkan dalam seminar ini Direktur Jenderal (Dirjen) Hortikultura Departemen Pertanian Ahmad Dimiyati yang mewakili pemerintah dengan terang-terangan menolak kesimpulan akhir yang disampaikan dari seminar tersebut.

Ahmad Dimiyati yang dalam kesempatan ini menyampaikan apresiasinya terhadap surplus beras di Indonesia, namun mendapat sanggahan bertubi-tubi dari para mahasiswa. Mahasiswa yang merupakan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa

(BEM) Fakultas Pertanian dari sejumlah universitas negeri menyampaikan kegelisahan mereka mengapa jika surplus petani tetap miskin dan apakah layak untuk membicarakan ekspor beras di tengah kondisi masih banyaknya rakyat Indonesia yang kesulitan mengakses makanan, dalam hal ini beras.

Dalam paparannya Ahmad Dimiyati menyampaikan mengenai masalah distribusi yang menjadi penyebab kesulitan akses masyarakat terhadap bahan pangan pokok. Dimiyati menyampaikan usaha pemerintah membangun apa yang disebut sebagai rantai pasok yang terstruktur untuk membangun hubungan petani dengan konsumen.

Sayangnya konsumen atau pengguna produk yang dimaksud disini ialah pihak

industri pengolahan makanan swasta melalui sistem kemitraan seperti sistem PIR di perkebunan. Padahal sistem kemitraan ini justru membuat petani kehilangan kemandirian dan kreativitas untuk mengembangkan pengolahan bahan baku dan tidak menjawab masalah distribusi yang ada saat ini karena industri swasta akan mengontrol pemasaran dan penetapan harga.

Menurut Ya'kub, pertanian dan pangan jangan sampai diperlakukan sebagai barang dagangan belaka namun harusnya dipandang sebagai kebutuhan paling mendasar rakyat dan pemerintah punya kewajiban untuk memenuhi dan melindunginya sesuai konstitusi. Karena itulah peran pemerintah sangat vital bagi kemajuan dan kemakmuran rakyat.##





## UU pangan harus lindungi petani kecil

Undang-undang (UU) pangan harus melindungi petani kecil sebagai produsen pangan dan melindungi pasar lokal dan nasional. Hal tersebut dikemukakan Ketua Umum Henry Saragih pada kesempatan dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Jakarta (3/2). Seperti diketahui DPD RI berinisiatif untuk membuat undang-undang pangan yang baru pengganti UU No.7 tahun 1996.

Lebih jauh Henry mengatakan, Rancangan Undang-undang (RUU) pangan ini hendaknya mengatur perlindungan terhadap produsen yang juga merupakan konsumen serta konsumen murni dengan proporsi yang lebih adil. RUU ini juga harus memasukkan konsep Kedaulatan Pangan dalam pelaksanaannya. RUU pangan harus bisa menanggulangi pelemahan pangan Indonesia yang semakin terasa dengan keterikatan terhadap berbagai peraturan-peraturan internasional.

“Saat ini surplus beras dan wacana ekspor beras menjadi wacana politis semata, bukan dengan tujuan untuk menyejahterakan petani dan rakyat Indonesia secara umum,” tutur Henry. Dia juga mengemukakan bahwa inisiatif-inisiatif pemerintah daerah untuk membangun dan melindungi petani harus terus dimajukan karena petani merupakan mayoritas penduduk Indonesia yang merupakan produsen sekaligus konsumen pangan.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komnas HAM RI Ridha Saleh mengatakan masalah pangan sangat terkait masalah ekonomi, sosial dan politik. Persoalan pangan juga merupakan persoalan akses sementara UU Pangan yang ada filosofinya justru membunuh akses.

Ridha mengutip laporan PBB bahwa krisis pangan yang terjadi merupakan kejahatan atas kemanusiaan, mengingat besarnya laju konversi pangan untuk energi.

Komnas HAM mencatat sepanjang

tahun 2008 ada 4000 laporan kasus yang masuk dan 40% diantaranya merupakan konflik tanah, dan tanah ini terkait dengan produksi pangan.

“Salah satu tugas Komnas HAM adalah melaporkan ke sidang HAM PBB mengenai harmonisasi kebijakan UU di Indonesia sejalan dengan ratifikasi Kovenan EKOSOB dan salah satunya ialah harmonisasi UU Pangan,” ujar Ridha.

### Perlu UU baru

Sementara itu, pimpinan sidang DPD Sarwono mengatakan bahwa dengan latar belakang melihat penandatanganan Kovenan Ekosob yang disahkan dengan UU No.11 tahun 2005 maka ada kewajiban negara untuk memenuhi hak asasi manusia termasuk hak kecukupan atas pangan yang sesungguhnya belum ada operasionalnya. Dari seminar yang dilakukan di Palembang dan Jogja beberapa waktu sebelumnya DPD menyimpulkan perlunya membuat UU Pangan yang baru, bukan sekedar merevisi yang sudah ada.

Lebih jauh, Sarwono melihat sejumlah kenyataan yang ada seperti kondisi pertanian Indonesia yang semakin menurun, terjadinya perubahan iklim dan perkembangan energi alternative biofuel menimbulkan kekhawatiran semakin langkanya pangan dan timbulnya kompetisi pangan untuk energi yang perlu diatur dengan baik. Disamping itu, ia juga melihat krisis pangan diatasi dengan investasi semata yang sungguh sangat berbahaya.

Oleh karena itu, dia menilai UU No.7 tahun 1996 harus diganti menjadi UU baru bukan hanya direvisi karena dinilai tidak sesuai dengan konstitusi bangsa dan tidak mengakomodir kovenan EKOSOB. Ia juga menambahkan peraturan yang baru tersebut harus bisa selesai sebelum tahun 2010 sebagai batas waktu pelaporan harmonisasi kebijakan terhadap kovenan ekosob ke dewan HAM PBB.#

## Secara umum nilai tukar petani turun

Pada Januari 2009, Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) tercatat sebesar 94,39, Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) 99,75, Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) 100,26, Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) 103,98, dan untuk Nilai Tukar Nelayan (NTN) 105,34. Secara gabungan, Nilai Tukar Petani (NTP) nasional sebesar 98,30. Ini berarti mengalami penurunan bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu sebesar 0,70 persen.

Dari 32 provinsi yang dilaporkan pada Januari 2009, terdapat 18 provinsi mengalami kenaikan, 12 provinsi mengalami penurunan dan 2 provinsi cenderung stabil. Kenaikan tertinggi NTP Januari 2009 terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu sebesar 2,66 persen, karena indeks yang diterima naik hingga 2,59 persen (didominasi komoditi cabe rawit), sedang indeks yang dibayar hanya turun 0,07 persen. Penurunan NTP terbesar terjadi di Provinsi Jawa Tengah yang turun sebesar 4,32 persen, disebabkan indeks yang diterima turun sebesar 4,16 persen (didominasi komoditi padi dan jagung) sedangkan indeks yang dibayar naik sebesar 0,16 persen.

Pada Januari 2009, terjadi Inflasi di daerah pedesaan di Indonesia sebesar 0,45 persen. Inflasi pedesaan Januari 2009 ini dipengaruhi oleh kenaikan indeks harga di 6 (enam) subkelompok, yaitu subkelompok bahan makanan 0,59 persen, makanan jadi 1,20 persen, perumahan 0,20 persen, sandang 0,96 persen, kesehatan 0,86 persen, serta pendidikan, rekreasi & olah raga 1,20 persen. Sedangkan subkelompok transportasi dan komunikasi turun 3,07 persen yang diakibatkan oleh penurunan bahan bakar minyak.

Berdasarkan observasi sebanyak 864 transaksi gabah di 18 provinsi, rata-rata harga gabah di tingkat petani pada Februari 2009 dibandingkan keadaan Januari 2009 untuk kualitas Gabah Kering Giling (GKG) dan Gabah Kering Panen (GKP) mengalami kenaikan, yaitu GKG naik sebesar 6,11 persen dan GKP naik sebesar 1,27 persen. Sedangkan kualitas rendah/diluar kelompok kualitas mengalami penurunan sebesar 0,64 persen.

Rata-rata harga gabah di tingkat penggilingan untuk kualitas GKG mencapai Rp3.219,- per kg, berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Rata-rata harga gabah untuk kualitas GKP mencapai Rp2.778,- per kg di tingkat petani dan Rp2.839,- per kg di tingkat penggilingan, keduanya berada di atas HPP. Persentase observasi harga gabah di tingkat penggilingan yang berada di bawah HPP mengalami penurunan, yaitu dari 18,43 persen pada Januari 2009 menjadi 10,57 persen pada Februari 2009. Persentase observasi gabah berkualitas rendah mengalami kenaikan, yaitu dari 14,03 persen pada Januari 2009 menjadi 23,38 persen pada Februari 2009.

Harga gabah terendah di tingkat petani sebesar Rp1.800,- per kg dijumpai di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten (kualitas GKP). Harga tertinggi sebesar Rp3.800,- per kg dijumpai di Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat (kualitas GKG).

## SEKOLAH LAPANGAN

# SPI melantik kader pertanian berkelanjutan angkatan pertama

Serikat Petani Indonesia (SPI) melantik 20 siswa-siswi angkatan pertama dari Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Pertanian Berkelanjutan di Desa Cibereum, Bogor (12/2). Para siswa dinyatakan lulus mengikuti pendidikan pertanian berkelanjutan setelah dua bulan penuh mendalami paraktek-praktek dan materi-materi dari para pengajar Pusdiklat SPI. Mereka datang dari 10 propinsi yang diutus oleh Dewan Pimpinan Wilayah SPI masing-masing agar disiapkan menjadi kader-kader pertanian berkelanjutan. Dalam sambutannya, Ketua Umum SPI Henry Saragih meminta kader-kader pertanian berkelanjutan ini untuk mempraktekan dan mengajarkan pengetahuan pertanian berkelanjutan di wilayahnya masing-masing. "Kita perlu kader-kader yang tangguh untuk memperjuangkan kepentingan petani dan membuat sistem pertanian yang adil, tidak memiskinkan petani dan berkelanjutan," tutur Henry.

Lebih jauh lagi Henry berpesan agar para kader bisa

mengembangkan, memberikan contoh dan memparaktekan keterampilan yang didapatkan selama kursus. Pertanian berkelanjutan merupakan upaya kaum tani mewujudkan sistem pertanian yang lebih adil dan berwawasan lingkungan. Selama ini ketergantungan petani terhadap input luar pertanian sangat tinggi, sehingga petani kehilangan potensi keuntungan dari produksi pertaniannya. Pembangunan pertanian yang dicanangkan pemerintah masih berorientasi kepada revolusi hijau yang telah terbukti memiskinkan petani di pedesaan.

Henry yakin dengan sistem pertanian berkelanjutan, petani akan lebih diuntungkan karena input luar yang digunakan sangat minimal. Petani tidak harus lagi membeli pupuk, obat-obatan dan benih yang harganya selalu naik ketika musim tanam tiba dan kadang-kadang terjadi kelangkaan di lapangan. Selain itu, untuk jangka panjang pertanian berkelanjutan sangat menguntungkan petani dan konsumen pada umumnya karena lingkungan hidup relatif lebih terjaga dan produk yang



dihasilkan lebih sehat. "Pertanian berkelanjutan bisa memenuhi kebutuhan pangan manusia baik dari segi jumlah maupun mutunya," ujar Henry.

## Peresmian Pusdiklat

Pusdiklat Pertanian Berkelanjutan SPI di Desa Cibereum, Bogor sebenarnya

sudah berdiri sejak tahun 2005. Tempat ini dijadikan pusat koordinasi pengembangan pertanian berkelanjutan SPI. Praktek-praktek sudah seringkali diujicobakan di tempat ini, juga magang-magang yang diikuti 2-5 orang seringkali diadakan. Namun penerimaan siswa dalam jumlah banyak dan terprogram baru dibuka tahun lalu. Pusdiklat membuka kursus untuk angkatan pertama pada bulan Desember 2008 dan berakhir Februari 2009. Selanjutnya, kursus-kursus akan terus diadakan oleh Pusdiklat untuk mencetak kader-kader pertanian berkelanjutan.

Menurut Kepala Pusdiklat SPI, Titis Priyo Widodo, pola pendidikan di pusdiklat merupakan gabungan dari teori dan praktek. Selain itu, Pusdiklat juga memberikan materi-materi umum yang berkaitan dengan perjuangan kaum tani. "Selain belajar praktek pertanian, di sini juga diajarkan tentang perjuangan kaum tani dan bagaimana membangun organisasi gerakan petani," ujarnya.

Materi-materi umum yang diajarkan antara lain, pengenalan organisasi petani, pembaruan agraria, kedaulatan pangan, perubahan iklim, perlawanan





terhadap neoliberalisme, pengorganisasian gerakan rakyat dan hak-hak asasi petani. Menurut Titis materi tersebut wajib diberikan agar dalam melaksanakan pertanian berkelanjutan petani tidak kehilangan konteks perjuangannya. "Petani juga mempunyai hak politik untuk memperjuangkan nasibnya sendiri. Jadi selain memberikan contoh dalam praktek bertani, petani harus berani memperjuangkan hak-haknya apabila ditindas. Caranya dengan berorganisasi," ungkapnya.

#### Kesan siswa

Memang tak bisa dipungkiri kursus angkatan pertama ini

masih terdapat kekurangan-kekurangan kecil seperti fasilitas-fasilitas Pusdiklat yang masih minim. Namun secara umum para kader merasa puas berada dalam didikan SPI. Seperti dikemukakan Pinar di dari Sumatera Utara yang merasa mendapatkan pengetahuan baru mengenai perjuangan kaum tani dan mengapa pertanian berkelanjutan itu perlu bagi petani.

"Dengan adanya kursus, kami dapat mengenal dan tahu arti perjuangan kaum tani. Dan saya sangat senang menjadi keluarga sebuah organisasi yang bernama SPI," tutur Pinar di.#




## SAYUR SEGAR SEHAT SETIAP HARI

DIPETIK DAN DITERIMA LANGSUNG DI RUMAH

- . Ditanam pada lahan subur menggunakan pupuk alami
- . Tanpa penggunaan pestisida hingga panen
- . Tanaman segar dan tetap sehat

- . Produk organik paling sedikit terkontaminasi racun yang terkandung dalam pestisida
- . Mengonsumsi sayur organik secara rutin bisa meningkatkan kesehatan tubuh dan aman dari residu pemakaian bahan kimia dalam pestisida yang sangat berbahaya

Untuk memulai hidup yang lebih aman saatnya kita tinggalkan makanan yang tidak sehat dengan kembali mengonsumsi sayur organik



## SAYUR SEGAR SEHAT SETIAP HARI



**Pa Tani ORGANIK**  
pemesanan dan pelayanan  
hubungi: 081380166290 (SMS dan telepon)  
Kebun organik: Desa Cibeureum Darmaga Bogor

## EKONOMI RAKYAT

## Perjuangan petani Sembalun membangun

Kemandirian memiliki arti yang sangat penting. Baik untuk perorangan, keluarga, organisasi, juga untuk bangsa dan negara. Demikian halnya untuk Serikat Petani Indonesia (SPI) Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) memperjuangkan kemandirian organisasinya dengan membentuk badan-badan usaha, yang selanjutnya akan menopang pemenuhan dasar kebutuhan petani itu sendiri.

Ketua Pelaksana Wilayah Serikat Petani Indonesia (SPI) NTB Wahidjan mengatakan, pembangunan kemandirian organisasi petani merupakan hal mutlak untuk dilakukan. Karena pemenuhan kebutuhan dasar petani yang sampai saat ini tidak mendapat perhatian yang baik

dari pemerintah.

Menurut Wahidjan, pemerintah tidak hanya lamban menyikapi permasalahan petani namun juga tidak tepat sasaran dan menyelesaikan akar permasalahan. Buktinya, pupuk masih langka dan mahal dipasaran, harga jual produk pertanian yang tidak menentu, serta tengkulak dan ijon di pedesaan yang jelas merugikan petani masih berkeliaran.

Hal tersebut juga dialami petani Desa Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Di lereng Gunung Kerinci yang memiliki potensi besar sebagai penghasil sayuran dan buah, mereka membangun kebersamaan dalam organisasi dan berjuang untuk

meningkatkan produktifitas.

Secara bersama dalam naungan bendera SPI, petani Sembalun membangun demplot, menanam komoditas unggulan sayuran dan buah, dan menerapkan pertanian semi-organik.

Demplot dan kebun produksi dibangun di atas tanah lahan reclaiming anggota di areal eks. PT. Sembalun Kesuma Emas (PT.SKE) seluas 1 hektar. Anggota SPI wilayah NTB secara bertahap bergotong royong secara bergantian untuk mengelolah tanah dan telah membangun dua buah geleng (rumah panggung).

Untuk penanaman komoditas unggulan, petani Sembalun Lawang sudah memulai menanam Tomat saat

musim tanam pada pertengahan tahun 2008 lalu. Percobaan penanaman tomat dilakukan di atas lahan seluas 2,5 are dengan menerapkan pertanian semi organik.

Upaya menanam komoditas unggulan itu, tutur Wahidjan, menemui beberapa kendala. Yakni, biaya transportasi sampai ke pasar di Mataram yang tinggi, ketersediaan dan harga pupuk yang mahal, serta rantai distribusi yang sudah dikuasai tengkulak dan pengijon. "Kegagalan itu menjadi pelajaran berharga. Namun tidak menyurutkan perjuangan petani dalam membangun kemandirian," tegasnya.

Perjuangan SPI Wilayah NTB terhadap berbagai



# kemandirian

keterbatasan dan ketidakberpihakan pemerintah terhadap petani juga pernah dilakukan dengan upaya pertukaran komoditi pertanian untuk menjawab kebutuhan petani.

Berawal dari kekekuran bahan makanan pokok dan mahalnya harga beras, petani di Sembalun Lawang dan Tanak Awu mencoba melakukan pertukaran komoditi pertanian.

Dengan komoditi sayur mayur yang dimiliki petani Sembalun Lawang dan komoditi beras yang dimiliki petani Tanak Awu, barter dilakukan mulai pertengahan tahun 2007. Upaya itu sedikit demi sedikit dapat menjawab

permasalahan petani, terutama tentang kekurangan komoditi beras yang dialami petani Sembalun Lawang.

Bukan tanpa kendala, barter komoditi itu pun berjalan dengan berbagai rintangan. Mengenai kendala dan keterbatasan tersebut, menurut Wahidjan, menjadi tantangan untuk memperbaiki diberbagai sisi organisasi petani itu sendiri dan menjadi bukti dari ketidakberpihakan pemerintah terhadap kaum tani, karena tidak memberikan jaminan proteksi harga hasil produksi pertanian dan menjawab kebutuhan dasar petani akan pupuk dan pangan itu sendiri.#



# SPI Cabang Asahan menuntut penyelesaian konflik agraria

ASAHAN. Ratusan massa yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Asahan mendatangi Kantor Bupati Asahan (5/3) menuntut penyelesaian sengketa tanah yang dialami oleh anggota SPI Basis Simpang Kopas dan SPI Basis Sei Kopas Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan dalam usaha merebut kembali lahan pertanian milik mereka yang dikuasai oleh PT Jaya Baru Pratama dan PT Bakrie Sumatera Plantation.

Pada tahun 1949 masyarakat yang berasal dari Tomuan Holbung dan Desa Huta Padang membuka lahan pertanian dan sekaligus membuka perkampungan. Perkampung yang mereka diami diberi nama Sordang Tonga-tonga (Desa Simpang Kopas \u2013 sekarang). Pada saat itu pemerintahan masih bersistem kewedanaan (setingkat desa) dan Desa Huta Padang masih dipimpin oleh kepala kampung M. Bosir Sinurat. Tahun 1984, diadakan pencekingan atas areal masyarakat oleh oknum penguasa desa dengan alasan akan digantirugikan dengan pihak perusahaan, tanpa ada musyawarah tentang harga atas areal/tanah yang dikelola oleh masyarakat. Kemudian memanggil pemilik tanah untuk menerima ganti rugi atau lap keringat tanpa diketahui harga dan luas areal masing-masing penduduk yang diambil yang diambil tanahnya dan disuruh menandatangani tanda terima uang. Ternyata uang lap keringat hanya Rp 25.000/Ha dibagikan per orang tanpa melihat luas lahan yang dikelola masyarakat. Jika masyarakat menolak dan tidak bersedia menerima ganti rugi tersebut diintimidasi dan dituduh sebagai PKI atau penghalang pembangunan, sehingga intimidasi dan penindasan oleh oknum petugas pengawas pihak perusahaan untuk mengerjakan lahan tersebut. Lahan seluas 600 Ha saat ini dikuasai oleh PT Jaya Baru Pratama yang jelas-jelas tidak memiliki HGU.

Sementara itu, pada tahun 1953 masyarakat Sei Kopas membuka lahan di Desa Silau Jawa (Desa Sei Kopas \u2013 sekarang). Tahun 1983, Bupati Asahan pada waktu itu (Bahmit Muhammad - red) melalui Kepala Desa Silau Jawa dan Huta Padang menghimbau agar masyarakatnya menginventarisasi tanah tersebut kepada pemerintah setempat dengan maksud agar dijadikan pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat \u2013 red) dan menunjuk PT USP (Usaha Swadaya Pradana \u2013 red) sebagai bapak angkat dari program PIR. Tahun 1989, Bupati (Bahmit Muhammad) mengalihkan lahan kepada pihak-pihak pribadi staff PT Usaha Swadaya Pradana.

Selanjutnya PT Usaha Swadaya Pradana, yang ditunjuk sebagai bapak angkat pola PIR, merubah nama perusahaannya menjadi PT United Sumatera Plantation. PT United Sumatera Plantation menggunakan

kesempatan untuk memperluas arealnya dengan menanam pohon karet ke daerah perladangan Sionggang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge seluas kurang lebih 1.442 Ha, tanpa ada izin surat-surat penggarapan. Dari lahan yang digarap PT USP, seluas 674 Ha di dalamnya adalah lahan milik masyarakat Silau Jawa (sekarang Sei Kopas) dan Huta Padang. Tahun 1998, bapak angkat pola PIR mengusulkan izin HGU kepada Gubernur Sumatera Utara, namun ditolak dan ditanggguhkan karena masih tergolong dalam lahan sengketa, dengan dikeluarkannya SK Gubernur Sumatera Utara Nomor: 593.05/1392/K tahun 1998. Melalui SK tersebut telah dibentuk tim penertiban Permasalahan Garapan Penduduk di Areal PTPN II dan lainnya di Propinsi Sumatera Utara. Besar kemungkinan dikarenakan ketidakmampuan dalam pengelolaan maupun dalam pengurusan HGU. PT USP mengalihkan lahan sengketa kepada PT Bakrie Sumatera Plantation. Sampai saat ini lahan seluas 220 Ha tersebut masih dikuasai oleh PT Bakrie Sumatera Plantation.

Sejak bergulirnya masa reformasi masyarakat menghimpun kekuatan untuk merebut kembali lahan mereka, masyarakat yang tinggal di Desa Simpang Kopas bergabung menjadi anggota SPI Basis Simpang Kopas berjuang merebut kembali lahan mereka seluas 600 Ha yang dikuasai oleh PT Jaya Baru Pratama. Sementara itu masyarakat yang bermukim di Desa Sei Kopas menggabungkan diri menjadi anggota SPI Basis Sei Kopas berjuang merebut kembali lahan mereka seluas 220 Ha yang dikuasai oleh PT Bakrie Sumatera Plantation.

Dalam perjalanan memperjuangkan lahan ini, berbagai tindakan intimidasi dan kekerasan kerap terjadi. Walau demikian berbagai usaha juga ditempuh untuk merebut

kembali lahan tersebut, mulai dari membuat pengaduan ke pihak Legislatif, Eksekutif, dan BPN, dari tingkat Kabupaten hingga Propinsi yang masih dalam proses penyelesaian, bahkan petani anggota SPI Basis Sei Kopas juga melakukan pendudukan terhadap lahan dengan membangun gubuk-gubuk di lahan serta menanam lahan dengan tanaman pangan seperti ayur. Hal ini dilakukan selain untuk mempertahankan lahan milik mereka juga sebagai upaya meningkatkan taraf ekonomi.

Kali ini kembali petani anggota SPI Basis Simpang Kopas dan SPI Basis Sei Kopas membuat pengaduan dengan melakukan aksi bersama dengan anggota SPI Kabupaten Asahan di Kantor Bupati Asahan, menuntut agar pihak Pemkab Asahan segera menyelesaikan sengketa lahan yang dihadapi ini. Massa diterima oleh Asisten I Pemkab Asahan Zulkarnaen yang berjanji dalam dua minggu ini akan mengundang kedua perusahaan (PT Jaya Baru Pratama dan PT Bakrie Sumatera Plantation) untuk berdialog mengenai lahan yang dalam sengketa. "Untuk selanjutnya kami juga akan mengundang anggota SPI Kabupaten Asahan setelah pertemuan tersebut," lanjut Zulkarnaen.

Pihak BPN Kabupaten Asahan juga hadir dalam kesempatan ini, dan mereka membenarkan bahwa PT Jaya Baru Pratama tidak memiliki HGU. Namun, ketika massa meminta surat keterangan tidak memiliki HGU pihak BPN Kabupaten Asahan tidak mau memberikannya. BPN Asahan mengarahkan agar kami meminta langsung ke Kanwil BPN Sumut. "Kami dijadikan seperti bola, karena jika kami meminta ke Kanwil BPN Sumut maka akan dianjurkan ke BPN Kabupaten" kata Zubaidah Ketua SPI DPC Asahan.

**Sayuran segar & menyehatkan**

Pelayanan & pemesanan hubungi: 0813380166290  
Lokasi kebun: Desa Cibeureum Darmaga, Kab. Bogor